

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN SINGKAT KOMISI X DPR RI

# (BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang

2023 - 2024

Masa Persidangan ke-

: IV (Empat) : Terbuka

Sifat Rapat Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Dengan

: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rl.

Hari/Tanggal

: Rabu, 13 Maret 2024

Pukul

10.00 Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Pimpinan Rapat

: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI

Sekretaris Rapat

: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi

X DPR RI.

Acara

: 1. Evaluasi Program Kerja dan Anggaran sampai

Desember Tahun 2023

2. Menyampaikan DIPA TA 2024 sesuai amanat Raker 21 September 2023 sebagai bahan persiapan APBN

TA 2024

Hadir Komisi X DPR RI

Hadir Pemerintah

: 35 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.

Uno (Menparekraf/Kepala : Sandiaga Salahuddin

Baparekraf RI) beserta jajaran.

#### PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.32 WIB oleh Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi program dan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI sampai akhir Desember TA 2023 sebesar 98,38% atau Rp.3.336.778.598.665. (Tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dari pagu Rp3.391.631.213.000 (Tiga triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT UTAMA	PAGU TA 2023	Realisasi	%
1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	557.792.718.000	549.304.918.756.	98,48%
2	Inspektorat Utama	27.792.035.000	26.830.626.702	96,54%
3	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	56.598.624.000	56.276.976.353	99,43%
4	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	309.049.587.000	308.336.071.593	99,77%
5	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	177.896.415.000	176.142.050.029	99,01%
6	Deputi Bidang Industri dan Investasi	83.928.498.000	83.675.062.431	99.70%
7	Deputi Bidang Pemasaran	373.616.004.000	372.757.210.606	99,77%
8	Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan	244.692.261.000	241.873.688.828	98,85%
9	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	150.907.799.000	150.730.987.424	99,88%
10	OPD Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tugas Pembantuan)	45.140.000.000	43.424.461.843	96,20%
11	Badan Pelaksana Otorita	109.724.920.000	106.467.358.933	97,03%
12	UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1.254.492.352.000	1.220.948.426.257	97,33%
TOTAL		3.391.631.213.000	3.336.778.598.665	98,38%

- 2. Mengenai adanya authomatic adjustment (AA) sebesar Rp236.155.762.000 (dua ratus tiga puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) pada TA 2024, Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenparekraf/Baparekraf melakukan kajian secara cermat dan komprehensif agar adanya AA tersebut tidak mengganggu capaian target.
- 3. Dengan data realisasi TA 2023 sebagaimana angka 1 di atas dan DIPA TA 2024 yang telah disampaikan, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
  - a. Terhadap capaian jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang belum mencapai target, Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf untuk meningkatkan kinerja agar target kunjungan wisnus tahun 2024 dapat tercapai.
  - b. Menekankan kembali Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan K/L lain terkait, untuk melakukan penataan kelembagaan ekraf di daerah sehingga adanya nomenklatur di pemda yang menunjukkan keberpihakan terhadap pengembangan ekraf.
  - c. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengakselerasi penyusunan regulasi BLU Ekraf bersama K/L lain terkait, sehingga ekraf di daerah dapat lebih cepat tumbuh dan berkembang.
  - d. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun rencana dan strategi secara komprehensif untuk menjadikan berbagai even nasional dan internasional sebagai potensi dalam mendukung ekraf sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

- e. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan penguatan ekraf di Poltekpar (antara lain SDM dan laboratorium), agar lebih sinergi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan penguatan substansi dalam pembahasan RPJPN mengenai pariwisata dan ekraf dengan adanya keseimbangan padat modal dan padat karya.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.52

Menparekraf/ Kepala Baparekraf RI, Ketua,

TTD

TTD

Sandiaga Salahuddin Uno

H. Syaiful Huda